Utut Adianto: Koordinasi Pembangunan Infrastruktur TI dan Ekosistem Digital di Sumbar Perlu Ditingkatkan

Updates. - 24JAM.CO.ID

Sep 28, 2022 - 21:16

Image not found or type unknown

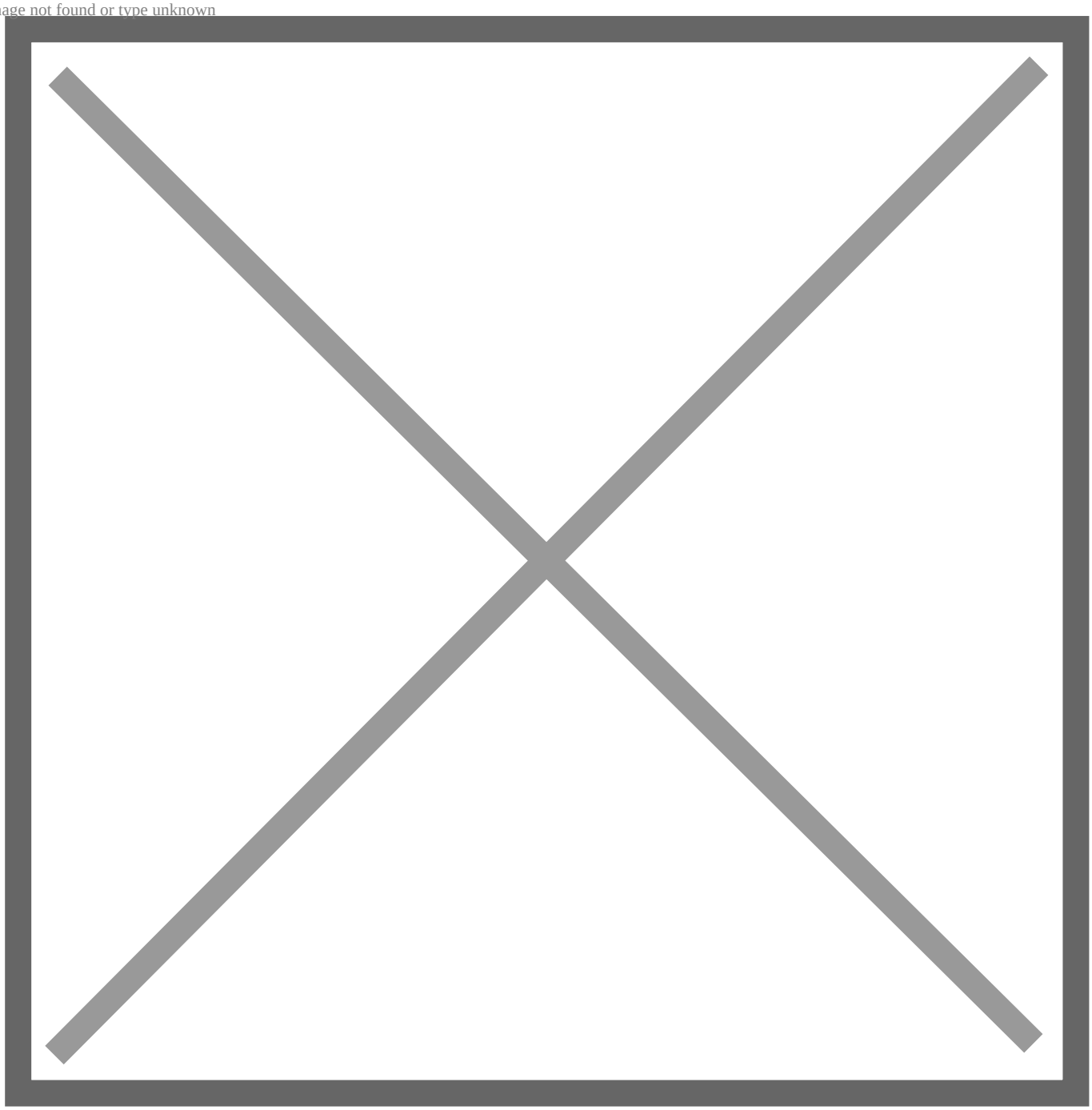

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto

PADANG - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Infomasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI memprioritaskan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) berupa jaringan telekomunikasi seluler dan penyedia akses internet pada fasilitas pemerintah dan umum pada daerah blankspot (daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal/3T).

“Dalam prosesnya, kami minta koordinasi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, dan operator Layanan Seluler 4G dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T ditingkatkan,” kata Utut saat memimpin Rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kominfo, Kepala Dinas Kominfo Sumatera Barat

, di Padang, Sumbar, Selasa (27/9/2022).

Koordinasi ini penting untuk ditingkatkan, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, guna mewujudkan Pelaksanaan penyediaan jasa akses internet yang merupakan amanat dari NAWACITA, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. BAKTI hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan pembangunan akses broadband, khususnya di daerah yang belum terjangkau.

Layanan ini menyedikan akses internet di Sekolah, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, Balai Desa, Kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T. Terakhir, Utut mengatakan, hadirnya Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Sumber guna menyerap aspirasi dari 11 Dinas Kominfo se-Sumbar terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital di seluruh wilayah Sumbar.

“Dan semua masukan ini akan kami teruskan saat pertemuan dengan Kemnterian Komunikasi dan Informatika RI,” jelas Utut. Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Krisantus Kurniawan meminta pemerintah daerah serta Dinas Kominfo mengawasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ekosistem digital di Sumbar. “Pengawasan pelaksanaan pembangunan BTS adalah tanggungjawab pemerintah daerah agar niat baik ini bisa benar benar memberikan manfaat untuk masyarakat, khusunya yang di wilayah 3T,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Solok Selatan Firdaus Firman menyampaikan 3 unit BTS atau Menara Telekomunikasi bantuan BAKTI Kominfo kurang berjalan dengan baik, sehingga tidak dimanfatkan masyarakat secara optimal.

“Dari tinjauan lapangan dan juga keluhan masyarakat, 3 BTS Bakti di Solok Selatan kurang berjalan optimal. Terutama untuk pengguna internet, dimana sinyal 4G ada, tapi tidak bisa digunakan untuk internet. Dan ini sering disebut masyarakat sinyal hantu,” kata Firdaus. (rnm/sf)